

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PURWOREJO**

1. Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2026
2. W a k t u : Pukul . 09.00 WIB
3. T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
4. Keterangan : Pertemuan dengan Tata Muka
- I. JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk umum
- III. ACARA RAPAT: 1. Laporan Pansus 11 atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2. Penetapan Keputusan DPRD
3. Pendapat Akhir Bupati
4. Penanda tanganan Peretujuan Bersama

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : TUNARYO, S.Sos
2. Jabatan : Ketua DPRD

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
2. Jabatan : Sekretaris DPRD

VI. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 31 orang dari 45 Anggota DPRD

1. Terdiri dari :

a. Fraksi PDI Perjuangan	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
b. Fraksi Partai Golkar	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
c. Fraksi Partai Demokrat	Dari	7	Orang	hadir	7	orang
d. F. Partai Kebangkitan Bangsa	Dari	6	Orang	hadir	5	orang
e. Fraksi Nasdem	Dari	4	Orang	hadir	4	orang
f. Fraksi Gerindra	Dari	5	Orang	hadir	5	orang
g. Fraksi Persatuan Pembangunan	Dari	4	Orang	hadir	4	orang

2. H a d i r

a. Fraksi **PDI-Perjuangan**

1. Tunaryo
2. Drs Subeno
3. Drs. Jaka Hartana

4. Alipman Syafi'i, SE
5. Erwin Sulistiani
6. Roy Adinata Sutanto
7. Timbul Susilo
8. Cipto Waluyo

b. Fraksi **Partai Golongan Karya**

1. Rokhman
2. Rani Summadiyaningrum, S.Farm.Apt
3. Sutardi.
4. Danan Purnomo, SH, M.Si
5. Roni Sumhastomo, SE
6. Akhmad Afif, S.Pd.I
7. Berliando Luthfi Zulfikar, S.Psi
8. Dwi Hartati

c. Fraksi **Partai Demokrat**

1. Estri Utami Setyowati, ST
2. Hendro Susilo, S.E.
3. H. Rujiyanto, S.Ag., MM
4. Sekar Ati Argorini, A.Md.
5. Sigit Apriyanto
6. Ign Yudha Ari Gunawan, SP
7. . Alfin Ma'ruf Pratama

d. Fraksi **Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Hj Nani Astuti, S.Pd
2. Budi Sunaryo, S.Sos
4. H. Much Dahlan, SE
4. Shokhibal Untung

e. Fraksi **Partai NasDem**

1. Fidhy Kiawan, SP
2. Ivan Fatchan Gani W, SE
3. Eko Januar Susanto, SH, MH
4. Hj. Tursiyati

f. Fraksi **Partai Gerakan Indonesia Raya.**

1. Nur Hidayat Pramudyanto
2. Awan Yoga Kurniawan
3. Muharomah, S.H.
4. Ajeng Dewi Purnamasari, SH., MH
5. Endang Tavip Handayani, SH

g. Fraksi **Persatuan Sejahtera**

1. KH. Akhmad Tawabi, S.Sos
2. Akhmad Ngafifurrohman, S.Pd.I.
3. Akhmad Ridho Adi Nugroho, ST
4. Ferro Setiasono

3. **Tidak hadir :**

a. Fraksi PDI-Perjuangan

1. Rendi Aditya Saputra

- b. Fraksi Partai Golkar
 - 1. Sumitro, A.Md
- c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 - 1..Abtadiussholikhin, S.H.I

VII. **JALANNYA RAPAT**

1. Pembukaan

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dimulai terlebih dahulu mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo.

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang dari 44 orang Anggota DPRD, maka sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf (c) Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo, rapat telah memenuhi kuorum.

Setelah melalui [embahasan yang intensif Panitia khusus dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Eksekutif maka berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari selasa tanggal 02 Juni 2026 beserta perubahannya pada hari Rabu tanggal, 07 Juli 2026 maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah

- 1. Laporan Pansus 11 atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 2. Penetapan Keputusan DPRD
- 3. Pendapat Akhir Bupati
- 4. Penanda tangan Peretujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Hasil

1. Laporan Pansus 11 atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Setelah Pansus 11 DPRD Kabupaten Purworejo melaksanakan pembahasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka disampaikan hasil pemabahasan sebagai berikut

A. PENDAPATAN DAERAH

pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.475.346.309.493,00 (Dua trilyun empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebaagai berikut :

- PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 555.670.766.314 (lima ratus lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah)
- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.855.859.246.302,00 (Satu trilliyun delapan ratus lima puluh lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah / tidak ada)

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebesar Rp. 2.362.106.463.373,00 (Dua Trilliyun tiga ratus enam puluh dua milyar seratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional sebesar Rp. 1.655.855.682.678,00
- Belanja Modal sebesar Rp. 216.183.228.381,00
- Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 0,00
- Belanja Transfer sebesar Rp. 490.067.552.314,00

C. Surplus/ Defisit sebesar Rp. 49.423.549.243,00 dari Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah

D. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Sebesar	Rp. 85.220.758.378,00
Pengeluaran Pembiayaan Sebesar	Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 83.220.758.378,00
SILPA	Rp. 132.644.307.621,00

CATATAN-CATATAN DARI HASIL PEMBAHASAN

Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan ke DPRD merupakan hasil audit BPK yang bersifat final. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, maka disampaikan rekomendasi atau catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna sebagai dasar perbaikan kinerja Pemerintah Daerah kedepan, yaitu antara lain :

1. Terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK agar ditindaklanjuti atas temuan tersebut dan supaya dilakukan pengawasan atas tindak lanjutnya agar dikemudian hari tidak terulang kembali.
2. Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai akibat tidak terpenuhinya Target Program Kerja sebesar Rp. 132.644.307.621,00 agar dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu atas SILPA Terikat agar dipergunakan sesuai alokasi yang sudah ditentukan, dan atas SILPA bebas agar dipergunakan untuk program atau kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah Pansus 11 melaksanakan pembahasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka Pansus 11 DPRD Kabupaten Purworejo menyerahkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD. Untuk ditetapkan dalam suatu persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD

2. Penetapan Keputusan DPRD

Karena sahnya keputusan di tangan Anggota yang hadir Setelah mendengarkan laporan Pansus 11 atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagian besar Anggota DPRD yang hadir dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, maka dengan ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Raperda menjadi menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti dengan melaksanakan Raperda yang telah ditetapkan.

3. Sambutan Bupati .

Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus 11 DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 terkait hasil Pembahasan tersebut pada prinsipnya dapat menerimanya untuk ditindaklanjuti dengan Nota Persetujuan Bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku kami akan segera mengajukan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur untuk di evaluasi dengan harapan semoga proses Evaluasi dapat dilaksanakan dengan lancar dan tindak lanjut

atas hasil evaluasi dapat dipenuhi sesuai jadwal yang direncanakan dan setelah hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah diperoleh maka Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Purworejo dapat segera ditetapkan .

4. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 maka Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Demikian Rapat paripurna Laporan Pansus 11 atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, . Penetapan Keputusan DPRD, Pendapat Akhir Bupati dan Penanda tangan Peretujuan Bersama ,Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan RahkmatNya kepada kita sekalian untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan Sejahtera .

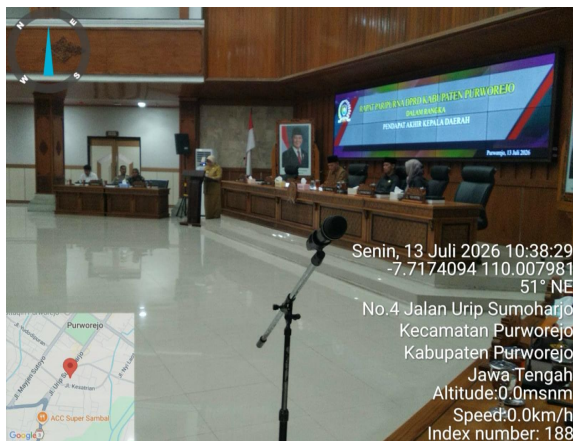
Billahittaufiq wal hidayah,

Wassallaamu'allaikum wr.wb

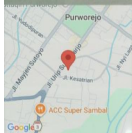
Purworejo, 13 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO





Senin, 13 Juli 2026 10:38:29
-7.7174094 110.007981
51° NE
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:0.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 188



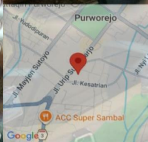
Senin, 13 Juli 2026 10:19:50
-7.71734818 110.00795594
— 131° SE
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:100.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 185

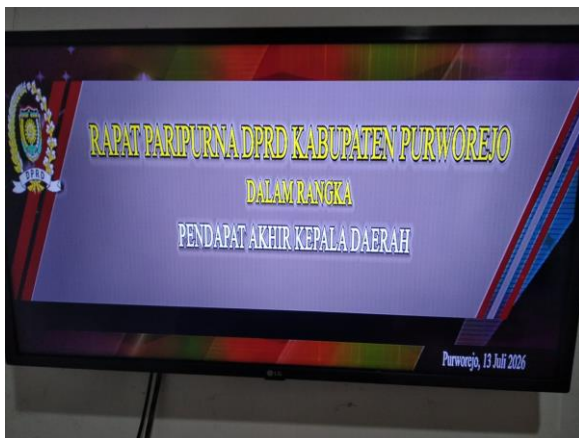


Senin, 13 Juli 2026 10:21:16
-7.7173237 110.0079228
192° S
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:0.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 186



Senin, 13 Juli 2026 10:15:08
-7.7173207 110.00796694
16° N
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:104.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 183







Senin, 13 Juli 2026 11:02:47
-7.71734525 110.00805907
164° S
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:103.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 197



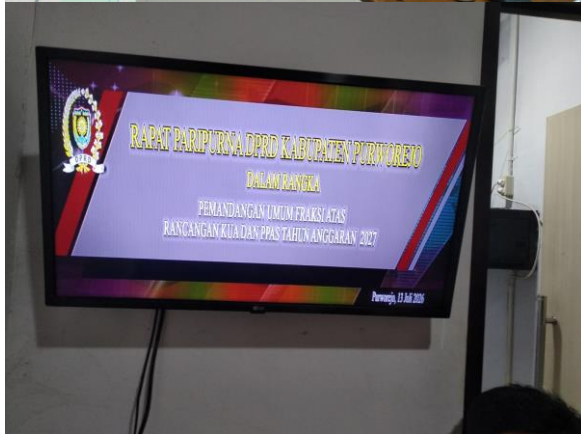
Senin, 13 Juli 2026 11:06:26
-7.7173946 110.007967
65° NE
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:0.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 200



Senin, 13 Juli 2026 11:03:00
-7.71734442 110.00805312
164° S
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:103.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 198



Senin, 13 Juli 2026 11:03:01
-7.71734439 110.00805306
163° S
No.4 Jalan Urip Sumoharjo
Kecamatan Purworejo
Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah
Altitude:103.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 199



**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PURWOREJO**

1. Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2026
2. Waktu : Pukul . 10.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
4. Keterangan : Pertemuan dengan Tata Muka
- I. JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk umum
- III. ACARA RAPAT: 1. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : TUNARYO, S.Sos
2. Jabatan : Ketua DPRD

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
2. Jabatan : Sekretaris DPRD

VI. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 31 orang dari 45 Anggota DPRD

2. Terdiri dari :

Fraksi PDI Perjuangan	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Golkar	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Demokrat	Dari	7	Orang	hadir	7	orang
F. Partai Kebangkitan Bangsa	Dari	6	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Nasdem	Dari	4	Orang	hadir	4	orang
Fraksi Gerindra	Dari	5	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	Dari	4	Orang	hadir	4	orang

3. H a d i r

a. Fraksi **PDI-Perjuangan**

1. Tunaryo
2. Drs Subeno
3. Drs. Jaka Hartana
4. Alipman Syafi'i, SE
5. Erwin Sulistiani
6. Roy Adinata Sutanto
7. Timbul Susilo
8. Cipto Waluyo

b. Fraksi **Partai Golongan Karya**

1. Rokhman
2. Rani Summadiyaningrum, S.Farm.Apt
3. Sutardi.
4. Danan Purnomo, SH, M.Si
5. Roni Sumhastomo, SE
6. Akhmad Afif, S.Pd.I
7. Berliando Luthfi Zulfikar, S.Psi
8. Dwi Hartati

c. Fraksi **Partai Demokrat**

1. Estri Utami Setyowati, ST
2. Hendro Susilo, S.E.
3. H. Rujiyanto, S.Ag., MM
4. Sekar Ati Argorini, A.Md.
5. Sigit Apriyanto
6. Ign Yudha Ari Gunawan, SP
7. . Alfin Ma'ruf Pratama

d. Fraksi **Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Hj Nani Astuti, S.Pd
2. Budi Sunaryo, S.Sos
4. H. Much Dahlan, SE
4. Shokhibal Untung

e. Fraksi **Partai NasDem**

1. Fidhy Kiawan, SP
2. Ivan Fatchan Gani W, SE
3. Eko Januar Susanto, SH, MH
4. Hj. Tursiyati

f. Fraksi **Partai Gerakan Indonesia Raya.**

1. Nur Hidayat Pramudyanto
2. Awan Yoga Kurniawan
3. Muharomah, S.H.
4. Ajeng Dewi Purnamasari, SH., MH
5. Endang Tavip Handayani, SH

h. Fraksi **Persatuan Sejahtera**

1. KH. Akhmad Tawabi, S.Sos
2. Akhmad Ngafifurrohman, S.Pd.I.
3. Akhmad Ridho Adi Nugroho, ST
4. Ferro Setiasono

3. **Tidak hadir :**

a. Fraksi PDI-Perjuangan

1. Rendi Aditya Saputra

b. Fraksi Partai Golkar

1. Sumitro, A.Md

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

- 1..Abtadiussholikhin, S.H.I

VII. JALANNYA RAPAT

2. Pembukaan

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dimulai terlebih dahulu mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo.

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang dari 44 orang Anggota DPRD, maka sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf (c) Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo, rapat telah memenuhi kuorum.

Setelah melalui [embahasan yang intensif Panitia khusus dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Eksekutif maka berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari selasa tanggal 02 Juni 2026 beserta perubahannya pada hari Rabu tanggal, 07 Juli 2026 maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah

1. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027

Hasil

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027

maka disampaikan hasil sebagai berikut

A. PENDAPATAN DAERAH

pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.441.246.771.610,00 (Dua trilyun empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebaagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH DIANGGARKAN SEBESAR Rp. 613.789.863.610 dengan rincian sebagai berikut :

- PAD (Pendapatan Asli Daerah) dianggarkan sebesar Rp. 158.723.571.436
- Pendapatan Retibusi Rp. 427.037.686.611,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 17,494.173.415,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 10.534.432.148,00
- Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp. 1.827.456.908.000,00 terdiri dari Pendapatan Transfer dari pusat sebesar Rp. 1.740.424.404.000,00 Pendapatan Transfer antar daerah dianggarkan sebesar Rp. 87.032.504.000,00 dan lain-lain dianggarkan sebesar Rp. 0

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebesar Rp. 2.607.848.667.165,00 yang digunakan untuk belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan belanja transfer terdiri atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 905.257.790.199,00
- Belanja Barjas sebesar Rp761.407.129.314,00
- Belanja bunga sebesar Rp. 2.500.000.000,00
- Belanja Subsidi sebesar Rp. 0,00
- Belanja Hibah sebesar Rp. 65.296.479.554,00
- Belanja Bantuan sosial Rp. 1.522.521.300,00

C. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 344.019.314.250,00 dari digunakan untuk belanja

- Tanah sebesar Rp. 0,00
- Gedung dan Bangunan Rp.185.755.583.200,00
- Jalan Jaringan dan Irigasi Rp.113.443.341.150,00
- Aset tetap lainnya Rp. 7.733.999.000,00
- Aset lainnya Rp. 0,00
- Tak terduga Rp. 3.000.000.000,00

D. Belanja Tranfer dianggarkan sebesar Rp. 524.845.432.548,00 terdiri atas

- Belanja bagi hasil Rp. 23.100.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 501.745.432.548
- Pendapatan daerah Sebesar Rp. 166.601.895,555,00
- Pembiayaan daerah Netto Sebesar Rp. 166.601.895,555,00
- Penerimaan Pembiayaan Rp. 187.101.895.555,00 terdiri dari
- Sisa lebih anggaran sebelumnya Rp. 87.101.895.555,00
- Penerimaan Pembiayaan utang daerah Rp. 100.000.000.000,00 pembangunan Pasar Kutoarjo

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 20.500.000.000,00 untuk

- Pembentukan dana cadangan Rp. 15.000.000.000,00
- Penyertaan Modal Daerah Rp. 5.500.000.000,00
- SILVA dalam KUA PPAS 2027 Rp. 0,00

VIII. PENUTUP

Demikian Rapat Paripurna Penyampaian Bupati atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, ,Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan RahmatNya kepada kita sekalian untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan Sejahtera .

Billahittaufig wal hidayah,

Wassallaamu'allaikum wr.wb

Purworejo, 13 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO





**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PURWOREJO**

1. Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2026
2. Waktu : Pukul . 11.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
4. Keterangan : Pertemuan dengan Tata Muka
 - I. JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
 - II. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk umum
 - III. ACARA RAPAT: 1. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GABUNGAN ATAS RANCANGAN KUA DAN PPAS KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027
 - IV. PIMPINAN RAPAT
 1. Nama : TUNARYO, S.Sos
 2. Jabatan : Ketua DPRD
 - V. SEKRETARIS RAPAT
 1. Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD
 - VI. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 31 orang dari 45 Anggota DPRD
 3. Terdiri dari :

Fraksi PDI Perjuangan	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Golkar	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Demokrat	Dari	7	Orang	hadir	7	orang
F. Partai Kebangkitan Bangsa	Dari	6	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Nasdem	Dari	4	Orang	hadir	4	orang
Fraksi Gerindra	Dari	5	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	Dari	4	Orang	hadir	4	orang
 4. H a d i r
 - a.Fraksi **PDI-Perjuangan**
 - 1.Tunaryo
 - 2.Drs Subeno
 - 3.Drs. Jaka Hartana
 - 4.Alipman Syafi'i, SE
 - 5.Erwin Sulistiani
 - 6.Roy Adinata Sutanto
 - 7.Timbul Susilo
 8. Cipto Waluyo
 - b. Fraksi **Partai Golongan Karya**

1. Rokhman
2. Rani Summadiyaningrum, S.Farm.Apt
3. Sutardi.
4. Danan Purnomo, SH, M.Si
5. Roni Sumhastomo, SE
6. Akhmad Afif, S.Pd.I
7. Berliando Luthfi Zulfikar, S.Psi
8. Dwi Hartati

c. Fraksi **Partai Demokrat**

1. Estri Utami Setyowati, ST
2. Hendro Susilo, S.E.
3. H. Rujianto, S.Ag., MM
4. Sekar Ati Argorini, A.Md.
5. Sigit Apriyanto
6. Ign Yudha Ari Gunawan, SP
7. . Alfin Ma'ruf Pratama

d. Fraksi **Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Hj Nani Astuti, S.Pd
2. Budi Sunaryo, S.Sos
4. H. Much Dahlan, SE
4. Shokhibal Untung

e. Fraksi **Partai NasDem**

1. Fidhy Kiawan, SP
2. Ivan Fatchan Gani W, SE
3. Eko Januar Susanto, SH, MH
4. Hj. Tursiyati

f. Fraksi **Partai Gerakan Indonesia Raya.**

1. Nur Hidayat Pramudyanto
2. Awan Yoga Kurniawan
3. Muharomah, S.H.
4. Ajeng Dewi Purnamasari, SH., MH
5. Endang Tavip Handayani, SH

i. Fraksi **Persatuan Sejahtera**

1. KH. Akhmad Tawabi, S.Sos
2. Akhmad Ngafifurrohman, S.Pd.I.
3. Akhmad Ridho Adi Nugroho, ST
4. Ferro Setiasono

3. **Tidak hadir :**

a. Fraksi PDI-Perjuangan

1. Rendi Aditya Saputra

b. Fraksi Partai Golkar

1. Sumitro, A.Md

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

- 1..Abtadiussholikhin, S.H.I

VII. JALANNYA RAPAT

3. Pembukaan

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dimulai terlebih dahulu mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo.

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang dari 44 orang Anggota DPRD, maka sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf (c) Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo, rapat telah memenuhi kuorum.

Setelah melalui [embahasan yang intensif Panitia khusus dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Eksekutif maka berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari selasa tanggal 02 Juni 2026 beserta perubahannya pada hari Rabu tanggal, 07 Juli 2026 maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah :

1. Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027

1. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GABUNGAN ATAS RANCANGAN KUA DAN PPAS KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

Fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi dan menyambut baik rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dokumen ini merupakan landasan penting dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, yang akan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Penjelasan Bupati, Pemerintah Kabupaten Purworejo merencanakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 2,441 Triliun, sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2,608 Triliun, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp. 166,6 Miliar yang akan ditutup melalui Pembiayaan Daerah. Terhadap rancangan tersebut, Fraksi- Fraksi DPRD memberikan beberapa pandangan yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, yaitu Efektivitas Belanja Daerah.

Fraksi- Fraksi DPRD berharap Belanja Daerah lebih di arahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- Peningkatan Kualitas Irigasi Pertanian.
- Penyediaan Air Bersih.
- Penguatan Ketahanan Pangan.

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Peningkatan Mutu Pendidikan.
- Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
- Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran.

2. Kedua, Rencana Pembiayaan Melalui Utang Daerah.

Fraksi-Fraksi DPRD mencermati adanya Rencana Penerimaan Pembiayaan berupa utang daerah sebesar Rp. 100 Miliar yang direncanakan untuk Pembangunan Pasar Kutoarjo. Fraksi-Fraksi DPRD tidak menolak Pemanfaatan Pembiayaan Daerah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan serta benar benar digunakan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat Ekonomi jangka panjang. Namun demikian, Pemerintah Daerah perlu memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai :

- Skema Pinjaman Yang Akan Digunakan.
- Kemampuan Fiskal Daerah dalam Melakukan Pengembalian.
- Analisis Manfaat Ekonomi Pembangunan Pasar Kutoarjo.
- Proyeksi Peningkatan Pendapatan Daerah Setelah Pembangunan Selesai.
- Langkah Mitigasi Terhadap Risiko Fiskal di Masa Mendatang.
- Agar Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Karsa Bayu telah Selesai dilakukan, dan Seluruh Aspek Pengembalian Asset Benar-benar telah Clear and Clean.
- Pembangunan Pasar Kutoarjo dapat dilangsungkan tanpa Menimbulkan Konsekuensi Hukum dikemudian hari, dan akhirnya benar benar dapat mendorong Perekonomian serta Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutoarjo Khususnya, serta warga Kabupaten Purworejo pada umumnya.

3. Ketiga, Prioritas Pembangunan Daerah

Fraksi-Fraksi DPRD Berharap seluruh Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan RPJMD, RKPD, Program Prioritas Nasional, serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Purworejo.

Pembangunan hendaknya difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Desa, Pengawasan Pengembangan Strategis, Ketahanan Pangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, serta Transformasi Digital Pelayanan Publik.

4. Keempat, Aspirasi Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Meminta agar seluruh aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui MUSRENBANG maupun pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD

Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Fraksi-Fraksi DPRD juga meminta penjelasan Pemerintah Daerah terhadap beberapa hal berikut :

- Strategi konkret meningkatkan PAD di tengah Perlambatan Ekonomi Nasional.
- Langkah Efisiensi Belanja agar proporsi Belanja Pembangunan semakin meningkat.
- Target Capaian Pembangunan yang ingin diwujudkan pada Tahun Anggaran 2027 beserta indikator kerjanya.
- Strategi menjaga keberlanjutan Fiskal Daerah setelah adanya rencana Pembiayaan Melalui Utang Daerah.
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi ketidakpastian Ekonomi Nasional yang dapat memengaruhi transfer ke Daerah.

Fraksi-Fraksi DPRD menyakini bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya Anggaran, tetapi dari sejauh mana APBD mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Memperkuat Daya Saing Daerah, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menurunkan Angka Kemiskinan , serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Kelima, Stabilisasi Ekonomi di Tengah Dinamika Global dan Nasional.

Situasi ekonomi global yang masih bergejolak, ditambah dengan tantangan inflasi dan ketidakpastian Geopolitik, berdampak langsung pada Perekonomian Nasional. Oleh karena itu, kami memandang bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 harus mampu berkontribusi pada Stabilitas Ekonomi Daerah dan Menjaga Daya Beli Masyarakat. Alokasi Anggaran perlu diPrioritaskan untuk sektor-sektor Produktif, Pemberdayaan UMKM, serta Program-Program Jaringan Pengaman Sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak Fluktuasi Ekonomi.

6. Keenam, Pengelolaan Risiko Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Fraksi-Fraksi DPRD menekankan pentingnya Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan Risiko Bencana melalui Program Mitigasi, Kesiap-siagaan, dan Respons Cepat. Selain itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim seperti Penghijauan dan Pengelolaan Sampah juga harus menjadi perhatian serius dalam Perencanaan Anggaran.

7. Ketujuh, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mendukung kemandirian Fiskal Daerah, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial. Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk terus berinovasi dalam menggali potensi PAD, baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Investasi menjadi salah satu instrumen penting

dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu membangun ekosistem dan iklim investasi yang sejuk dengan memberikan kemudahan kepada para investor baik dari aspek Regulasi, Perijinan seta Pemberian Insentif atau relaksasi sehingga para investor merasa nyaman dan aman menanamkan modalnya di Purworejo. Peningkatan PAD akan memberikan ruang Fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program Pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Lebih daripada itu, kami berharap agar para Pejabat Daerah harus membangun kesadaran kolektif untuk menjadi teladan bagi masyarakat dan memiliki rasa *“Sense Of Crisis”*, Mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Terhadap Materi-Materi Rancangan RAPERDA tersebut diatas, Fraksi kami menyampaikan Substansi tersebut telah tertuang, dan apabila didalam kaidah hukum belum sempurna, Fraksi kami memandang penyempurnaan itu akan dilaksanakan dalam materi pembahasan dengan berdasar pada pemikiran dan pokok-pokok bahasan sebagaimana tersebut diatas maka Fraksi-Fraksi DPRD menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Pertama**, dapat menerima materi tentang rancangan kebijakan umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan pasal 15 Ayat (4) Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.
2. **Kedua**, Pembahasan lebih lanjut berupa saran, pendapat dan penyempurnaan terhadap materi dimaksud baik berupa kebijakan, kebahasaan, maupun lainnya akan dilakukan oleh Anggota-Anggota Fraksi kami dalam Rapat-Rapat Dewan yang membahas materi-materi yang dimaksud.

2.PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2027.

Sidang Dewan yang Terhormat, setelah mencermati rancangan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang diajukan oleh eksekutif, Fraksi Partai Demokrat secara prinsip menyatakan SEPAKAT dan mendukung arah kebijakan makro yang tertuang di dalamnya. Komitmen eksekutif dalam menjaga keseimbangan Fiskal serta keberanian mengambil langkah strategis seperti pembiayaan utang untuk pembangunan Pasar Kutoarjo patut kita apresiasi demi pemulihan ekonomi daerah.

Namun demikian, guna menyempurnakan kualitas anggaran ini agar benar-benar berwujud pada kesejahteraan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat memberikan rincian catatan, telaah, dan instruksi kritis sebagai berikut :

1. POSTUR PENDAPATAN DAERAH

Fraksi Partai Demokrat mencatat total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp. 2.441.246.771.610,00. Kami memberikan perhatian khusus pada struktur penyusunannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Dianggarkan sebesar Rp. 613.789.863.610,00. Fraksi Demokrat meminta komitmen tegas dari OPD penanggung jawab, mengingat porsi Retribusi Daerah (Rp. 427.037.686.611,00) jauh lebih besar di bandingkan Pajak Daerah (Rp. 158.723.571.436,00). Eksekutif harus memastikan pelayanan publik berjalan optimal agar target retribusi yang tinggi ini rasional dan tidak membebani masyarakat kecil.
- Pendapatan Transfer : Dianggarkan Sebesar Rp. 1.827.456.908.000,00 (Terdiri dari Transfer Pusat Rp. 1,74 Triliun dan Antar Daerah Rp. 87 Miliar). Kami mengingatkan agar eksekutif intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar alokasi transfer ini cair tepat waktu dan tepat sasaran.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah : Dicatat Sebesar Rp. 0,00.

2. POSTUR BELANJA DAERAH DAN DEFISIT

Total Belanja Daerah dianggarkan mencapai Rp. 2.607.848.667.165,00. Dengan komposisi pendapatan yang ada, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp. 166. 601. 895.555,00.

Fraksi Partai Demokrat memotret struktur belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi (Rp. 1. 735.983.920.367,00) : Didominasi oleh Belanja Pegawai (Rp. 905.257.790.199,00) dan Belanja Barang/Jasa (Rp. 761.407.129.314,00).
2. Belanja Modal (Rp. 344.019.314.250,00): Dialokasikan terbesar pada Gedung dan Bangunan (Rp. 185,7 Miliar) serta Jalan, Jaringan , dan Irigasi (Rp. 113,4 Miliar).
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) : Sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer : Sebesar Rp. 524.845.432.548,00.

Terdapat Defisit Anggaran tersebut, eksekutif menutupnya melalui Pembiayaan Netto sebesar Rp. 166.601.895.555,00 yang Bersumber dari SILPA tahun lalu sebesar Rp. 87,1 Miliar serta Penerimaan Utang Daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 untuk Pembangunan Pasar Kutoarjo. Sementara Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Dana Cadangan (Rp. 15 Miliar) dan Penyertaan Modal (Rp. 5,5 Miliar), sehingga menghasilkan SILPA Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0,00 (Berimbang).

CATATAN STRATEGIS : SEKTOR PENDIDIKAN HARUS DIPERHATIKAN.

Dibalik angka-angka makro yang telah disepakati di atas, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan paling tebal dan mendasar pada Sektor Pendidikan. Melihat besarnya alokasi Belanja Operasi yang mencapai Rp. 1.73 Triliun dan Belanja Barnag/Jasa sebesar Rp. 761,4 Miliar, Fraksi Demokrat menuntut penegasan konkrit dari eksekutif : Berapa porsi anggaran murni yang menyentuh pemenuhan hak dasar pendidikan anak-anak di Purworejo

Fraksi Partai Demokrat menyoroti tentang kejadian tahun lalu, sebagaimana hal ini menjadi perhatian publik, yang dimana muncul berbagai laporan dan pemberitaan mengenai adanya dugaan pungutan liar di beberapa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Terlepas dari hasil penanganan masing-masing kasus, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penindakan semata, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan sistem. Pemerintah Daerah perlu memastikan kecukupan pembiayaan sekolah, memperjelas mekanisme penggalangan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran sekolah, serta membuka kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara profesional. Oleh karena itu, dalam momentum KUA-PPAS TA 2027 ini, Fraksi Partai Demokrat menegaskan syarat keberpihakan anggaran sebagai berikut :

- Jaminan Anggaran Operasional Sekolah : Eksekutif melalui Belanja Operasi Barang dan Jasa harus memastikan kebutuhan dasar operasional sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP, tercukupi secara memadai.
- Prioritas Rehabilitasi Sekolah : Dari total Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai Rp. 185,7 Miliar, Fraksi Demokrat meminta agar perbaikan ruang kelas yang rusak di berbagai plosok Kecamatan Purworejo mendapatkan porsi prioritas yang tinggi, bukan sekedar pembangunan fisik gedung pemerintahan yang bersifat administratif.

Fraksi Partai Demokrat menyetujui dokumen KUA-PPAS 2027 ini dengan harapan yang besar bahwa catatan sektor pendidikan ini dijalankan secara serius pada tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD kelak.



VIII. PENUTUP

Demikian Rapat paripurna Pemandangan Umum Gabungan Fraksi-Fraksi dan Pemandangan Umum Partai Demokrat atas Penyampaian Bupati terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan RahmatNya kepada kita sekalian untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan Sejahtera .

Billahittaufiq wal hidayah,

Wassallaamu'allaikum wr.wb

Purworejo, 13 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



Pimpinan Rapat,

TUNARYO, S.Sos
Ketua DPRD



Sekretaris Rapat,

AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Sekretaris DPRD

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PURWOREJO**

1. Hari, tanggal : Senin, 13 Juli 2026
2. Waktu : Pukul . 13.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
4. Keterangan : Pertemuan dengan Tata Muka
- I. JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk umum
- III. ACARA RAPAT: 1. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : TUNARYO, S.Sos
2. Jabatan : Ketua DPRD

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
2. Jabatan : Sekretaris DPRD

VI. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 31 orang dari 45 Anggota DPRD

4. Terdiri dari :

Fraksi PDI Perjuangan	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Golkar	Dari	9	Orang	hadir	8	orang
Fraksi Partai Demokrat	Dari	7	Orang	hadir	7	orang
F. Partai Kebangkitan Bangsa	Dari	6	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Nasdem	Dari	4	Orang	hadir	4	orang
Fraksi Gerindra	Dari	5	Orang	hadir	5	orang
Fraksi Persatuan Pembangunan	Dari	4	Orang	hadir	4	orang

5. H a d i r

a. Fraksi **PDI-Perjuangan**

- 1.Tunaryo
- 2.Drs Subeno
- 3.Drs. Jaka Hartana
- 4.Alipman Syafi'i, SE
- 5.Erwin Sulistiani
- 6.Roy Adinata Sutanto
- 7.Timbul Susilo
8. Cipto Waluyo

b. Fraksi **Partai Golongan Karya**

1. Rokhman
2. Rani Summadiyaningrum, S.Farm.Apt
3. Sutardi.
4. Danan Purnomo, SH, M.Si
5. Roni Sumhastomo, SE
6. Akhmad Afif, S.Pd.I
7. Berliando Luthfi Zulfikar, S.Psi
8. Dwi Hartati

c. Fraksi **Partai Demokrat**

1. Estri Utami Setyowati, ST
2. Hendro Susilo, S.E.
3. H. Rujiyanto, S.Ag., MM
4. Sekar Ati Argorini, A.Md.
5. Sigit Apriyanto
6. Ign Yudha Ari Gunawan, SP
7. . Alfin Ma'ruf Pratama

d. Fraksi **Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Hj Nani Astuti, S.Pd
2. Budi Sunaryo, S.Sos
4. H. Much Dahlan, SE
4. Shokhibal Untung

e. Fraksi **Partai NasDem**

1. Fidhy Kiawan, SP
2. Ivan Fatchan Gani W, SE
3. Eko Januar Susanto, SH, MH
4. Hj. Tursiyati

f. Fraksi **Partai Gerakan Indonesia Raya.**

1. Nur Hidayat Pramudyanto
2. Awan Yoga Kurniawan
3. Muharomah, S.H.
4. Ajeng Dewi Purnamasari, SH., MH
5. Endang Tavip Handayani, SH

j. Fraksi **Persatuan Sejahtera**

1. KH. Akhmad Tawabi, S.Sos
2. Akhmad Ngafifurrohman, S.Pd.I.
3. Akhmad Ridho Adi Nugroho, ST
4. Ferro Setiasono

3. **Tidak hadir :**

a. Fraksi PDI-Perjuangan

1. Rendi Aditya Saputra

b. Fraksi Partai Golkar

1. Sumitro, A.Md

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

- 1..Abtadiussholikhin, S.H.I

VII. JALANNYA RAPAT

Pembukaan

Sebelum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dimulai terlebih dahulu mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo.

Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 39 orang dari 44 orang Anggota DPRD, maka sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf (c) Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purworejo, rapat telah memenuhi kuorum.

Setelah melalui [embahasan yang intensif Panitia khusus dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Eksekutif maka berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari selasa tanggal 02 Juni 2026 beserta perubahannya pada hari Rabu tanggal, 07 Juli 2026 maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah

JAWABAN BUPATI PUWOREJO ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

Dalam rapat paripurna sebelumnya, seluruh Fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo Tahun Anggaranbn 2027 yang kami sampaikan. Atas pemandangan umum yang telah disampaikan, kami mengucapkan terimakasih. Pada prinsipnya seluruh Fraksi DPRD menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut. Saran dan masukan yang akan kami perhatikan dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut menjadi komitmen kita bersama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan lebih fokus untuk melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja. Fokus anggaran dalam pencapaian keluaran dan hasil menjadi parameter penting dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 serta Rancangan KUA dan PPAS tahun Anggaran 2027.

Berkaitan dengan beberapa hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2027 serta beberapa hal teknis berhubungan dengan metari Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut dan lebih komprehensif dalam rapat Badan Anggaran DPRD maupun alat kelengkapan Dewan lainnya.

VIII. PENUTUP

Demikian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025. terima kasih atas perhatian dan perkenanya untuk melanjutkan pembahasan ini . Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan RahkmatNya kepada kita sekalian untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan Sejahtera .

Billahittaufig wal hidayah,

Wassallaamu'allaikum wr.wb

Purworejo, 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



